

BAB II

ETNIS ROHINGYA MENJADI PENGUNGGI DI BANGLADESH AKIBAT KONFLIK YANG TERJADI DI MYANMAR

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana awal mula konflik yang dialami oleh etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar. Akibat adanya konflik tersebut etnis Rohingya pergi dari Myanmar dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga salah satunya adalah Bangladesh. Mayoritas dari pengungsi Rohingya adalah anak-anak yang berjumlah sekitar 54% dari pengungsi Rohingya.

2.1 Konflik Rohingya di Myanmar

Di Myanmar, etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang beragama muslim. Pemerintah Myanmar enggan mengakui etnis Rohingya hingga mencabut status kewarganegaraan Rohingya. Rohingya dikenal sebagai imigran ilegal di Myanmar. Selain itu etnis Rohingya kerap mendapat perlakuan tidak adil, tindak kekerasan bahkan diskriminasi (Azar & Moon, 1986). Pada tahun 2017 konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya semakin memanas karena terjadinya bentrok dengan etnis Rakhine di Myanmar. Sejarah mencatat konflik panjang antar dua etnis ini. Selain terlibat bentrok dengan etnis Rakhine, etnis Rohingya juga mengalami serangan secara brutal dari otoritas Myanmar.

2.1.1 Konflik antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine

Dahulu Myanmar dikenal dengan sebutan Burma, sehingga kemudian pemerintah Junta Militer mengubahnya menjadi Myanmar pada tanggal 18 Juni

tahun 1989. Myanmar merupakan negara yang memiliki hampir 140 etnis, yang terbagi menjadi penduduk etnis mayoritas dan etnis minoritas (Keling, Saludin, von Feigenblatt, Ajis, & Shuid, 2010). Sebagaimana etnis adalah pengertian dari sekelompok orang yang memiliki ciri khas dalam hal suku maupun agama. Etnis yang terdapat di Myanmar diantaranya adalah etnis Burma atau Bamar sebagai etnis terbesar (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (4%) dan Mon (2%). Disamping etnis tersebut terdapat juga etnis Karenni, Kachin, Chin serta Rohingya (Engel, 2014). Rohingya adalah salah satu etnis Muslim dan minoritas yang tinggal di Myanmar. Keberagaman etnis yang terdapat di Myanmar, secara historis tidak terlepas dari masa pendudukan Inggris pada tahun 1824.

Inggris menjajah Myanmar lebih dari satu abad, pemerintah Inggris juga mengambil tenaga kerja migran untuk bekerja pada mereka. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris berdampak pada banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke Myanmar sehingga populasi Muslim meningkat dengan pesat (M. P. Hossain, 2017). Pada awal tahun 70-an total populasi Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine Myanmar berjumlah sekitar 3,6 juta jiwa. Etnis Rohingya jelas mendukung pemerintah Inggris dan mereka dijanjikan tanah khusus oleh Inggris untuk “Wilayah Negara Muslim” sebagai bentuk imbalan atas dukungan Rohingya pada Inggris. Terbukti pada saat pecahnya Perang Dunia II, Rohingya memihak Inggris. Dukungan yang diberikan etnis Rohingya tentunya berbeda dengan Myanmar sebagai kubu nasionalis dan berpihak pada Jepang. Seusai terjadinya Perang Dunia II, Inggris berjanji memberikan daerah otonom pada Rohingya namun faktanya tidak terealisasi secara langsung.

Setelah kemerdekaan, Rohingya mengajukan janji tentang pembentukan daerah otonom, Namun pemerintah menolak pengajuan tersebut. Dalam sejarah Myanmar, bentuk dukungan Rohingya terhadap Inggris menjadi catatan buruk dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Pemerintah Myanmar dan kubu nasionalis menyebut etnis Rohingya sebagai orang asing di Myanmar. Hal ini membuat persatuan antara gerakan nasionalis dan Budhisme dengan tujuan untuk membuat kebencian terhadap Rohingya. Pemerintah Myanmar juga bersikeras menolak untuk memberikan identitas kewarganegaraan untuk Rohingya. Pada tahun 1950 terjadi gerakan yang menekan dari Militer Myanmar karena terdapat beberapa orang yang menuntut pemerintah terkait pengakuan identitas dan kewarganegaraan Rohingya, mereka menuntut agar Rohingya diakui sebagai bagian dari negara Myanmar (Setiawan & Suryanti, 2021).

Saat pemerintah Junta Militer mengadakan sensus penduduk atau yang dikenal dengan istilah operasi “*Naga Min*” pada tahun 1977 dengan tujuan untuk mengetahui orang-orang yang memasuki Myanmar secara ilegal. Operasi “*Naga Min*” merupakan salah satu tindakan kekerasan brutal yang terjadi pada etnis Rohingya, yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer. Setelah sensus dilakukan maka keberadaan etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar. Secara resmi pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar “*the Burma Citizenship Law*” pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar (Human Rights Watch, 2013).

Kelompok etnis Rohingya tidak mendapat perhatian dan bahkan tersisihkan oleh pemerintah Myanmar. Kelompok etnis Rohingya kerap mendapat diskriminasi dan tindak kekerasan dari berbagai otoritas Myanmar. Kelompok etnis muslim Rohingya telah lama menetap di bagian Arakan atau Rakhine saat di Myanmar. “*Rooinga*” adalah sebutan untuk kelompok Rohingya yang memiliki arti penduduk asli Arakan, hal ini dicetuskan oleh laporan seorang doktor dari Inggris bernama Francis Buchanan pada tahun 1799. Berdasarkan laporan dari doktor tersebut diketahui fakta bahwa asal usul dimana istilah Rohingya adalah etnis yang telah lama ada di Arakan (Poling, 2014) namun nyatanya Rohingya dianggap imigran ilegal oleh pemerintah.

Banyaknya etnis yang berada di Myanmar antara etnis minoritas dan mayoritas justru menimbulkan konflik yang terjadi di dalam negara tersebut. Etnis Rakhine atau etnis Buddha yang merupakan mayoritas dan etnis Muslim Rohingya minoritas telah lama terlibat konflik, padahal kedua etnis tinggal pada satu wilayah yang sama. Awal mula konflik etnis yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine, ialah terlibat konflik perebutan wilayah di Myanmar yaitu Arakan, saat ini sudah berganti menjadi wilayah bagian Rakhine.

Konflik yang terjadi di Myanmar antara etnis Rakhine dan Rohingya mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2012. Peristiwa seorang gadis Rakhine yang diperkosa kemudian dibunuh oleh tiga pemuda etnis Rohingya mengakibatkan puncak konflik tahun 2012 semakin parah (Pagano, 2016). Kejadian tersebut menjadi pemicu terjadinya kekerasan massal antara etnis Rakhine dan Rohingya. Terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penghancuran dan

pembakaran rumah serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang muslim minoritas (Raharjo, 2015). Pada tahun 2012 tercatat data menunjukkan jumlah korban etnis Rohingya, 98 orang terbunuh, 123 orang terluka, 5.338 rumah etnis Rohingya dibakar dan sekitar 75.000 orang mulai mengungsi (Médecins Sans Frontières (MSF), 2017). Secara historis konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine tidak mudah dihentikan dan menemui titik damai. Konflik berdarah yang terjadi antara kedua etnis masih berlanjut hingga saat ini. Krisis kemanusiaan menjadi perhatian di Myanmar saat terjadinya konflik Rohingya dan Rakhine karena banyaknya korban yang berjatuhan.

Peran pemerintah sangat penting dalam penanganan konflik yang semakin memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar. Rohingya adalah kelompok yang mengalami kerugian lebih banyak, mereka memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya Rohingya adalah etnis yang terpinggirkan dan tidak diakui oleh pemerintah, mereka justru mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar. Diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya disebabkan oleh lemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan. Selain diskriminasi adanya tindak kekerasan secara terbuka juga dialami oleh etnis Rohingya. kekerasan tersebut terjadi berasal dari dukungan sebagian besar massa fanatik pemerintah Junta Militer. Etnis Rohingya terus menderita terkait adanya pembatasan bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar karena penolakan kewarganegaraan mereka oleh pemerintah Myanmar (Kumar Mohajan, 2018). Tindakan tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena

penganiayaan sudah lama terjadi sejak tahun 1948 saat Myanmar sudah merdeka dari kekuasaan Inggris (M. P. Hossain, 2017).

Kondisi darurat militer ditetapkan di Myanmar pada saat konflik Rohingya dan Rakhine tepatnya bulan Juni tahun 2012, pemerintah mengirimkan pasukan bersenjata ke wilayah bagian Rakhine. Namun, dalam laporan Human Rights Watch (HRW) datangnya pasukan bersenjata tersebut justru menjadi malapetaka bagi etnis Rohingya. Pasukan bersenjata pemerintah tersebut justru banyak menembaki etnis Rohingya yang dianggap sebagai imigran gelap. Jelas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar ini telah menjadi perhatian pada dunia internasional. Awalnya konflik internal yang melibatkan etnis merupakan masalah internal suatu negara namun dapat berkembang menjadi masalah internasional pula. Perhatian internasional muncul dari respon yang diberikan oleh negara-negara terkait permasalahan tersebut.

Setelah puncak konflik yang terjadi pada tahun 2012, kasus terus meningkat sehingga etnis Rohingya kembali mengalami puncak konflik. Terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar pada tahun 2016 dan 2017 (The Diplomat, 2017). Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 9 Oktober terjadi keriuhan yang dipicu oleh pemerintah Myanmar yang berencana menggusur perumahan milik etnis Rohingya. Akibatnya kelompok etnis Rohingya terlibat pertikaian dengan pasukan militer Myanmar. Awalnya terjadi insiden pembunuhan yang menewaskan sembilan prajurit militer yang menjaga perbatasan Myanmar. Kemudian sejak kejadian itu kasus pembunuhan meningkat, ratusan orang terbunuh dan dimasukkan ke dalam penjara militer, ribuan orang

Rohingya dibiarkan kelaparan dan bahkan sebagian besar wanita mengaku diperkosa dan sekitar 1.200 bangunan milik Rohingya sudah rata dengan tanah.

Rohingya kembali menjadi perhatian internasional pada pertengahan tahun 2017 lantaran kembali mengalami kebrutalan dari otoritas negara Myanmar (Fariba, 2019 : 3313). Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 hari dimana pasukan Militer Myanmar menyerang etnis Rohingya dibagian Rakhine, mereka menembaki pria, wanita dan anak-anak Rohingya, mereka juga menghancurkan kurang lebih 1.500 bangunan milik etnis Rohingya. Pada saat itu juga terdapat ARSA (*Arakhan Rohingya Salvation Army*) adalah kelompok pembela Rohingya. ARSA juga mendapat serangan mematikan dari kelompok pemerintah Militer Myanmar (Azra, 2017 : 1–3). Hal ini tentunya menjadi perhatian besar dan secara mutlak masuk dalam tindakan pelanggaran HAM berat. Karena terjadinya kekerasan, pembantaian, pembunuhan, penganiayaan, pembasmian massal atau genosida, dan pengusiran atau pemindahan secara paksa kepada etnis Rohingya. Menurut seorang politisi Myanmar, ia menduga bahwa terjadinya kericuhan ini memang sebagai langkah dari pemerintah Myanmar untuk mengurangi populasi etnis Rohingya yang berada di Myanmar (Sawal, 2017 : 5).

Salah satu akar dari konflik menahun yang terjadi pada etnis Rohingya adalah pandangan dari pemerintah Myanmar yang masih menganggap status etnis Rohingya sebagai imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar mengambil status kewarganegaraan untuk etnis Rohingya, sehingga mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Akibatnya para etnis Rohingya tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan pergerakan dan bahkan pekerjaan yang

layak untuk menopang kehidupan mereka. Rohingya dikenal sebagai kelompok minoritas paling teraniaya di dunia, yang hidup tanpa kewarganegaraan, menderita konflik bersenjata terkait etnis dan agama, penganiayaan serta pemindahan oleh negara mereka sendiri (Lego, 2017).

Konflik yang terjadi pada etnis Rohingya adalah krisis kemanusiaan. Sebagaimana krisis kemanusiaan terjadi apabila terdapat kondisi ketika hak-hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak tersebut meliputi hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan yang tidak mampu didapatkan oleh seorang individu. Banyak dampak yang terjadi akibat dari krisis kemanusiaan tersebut. Munculnya pelanggaran HAM, seperti adanya tindak penganiayaan, tindak kekerasan, dan yang paling penting tidak terpenuhinya hak dasar sebagai manusia oleh seorang individu. Terjadinya bentuk kekerasan, penganiayaan, penindasan bahkan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar telah mengarah pada bentuk kejahatan genosida (Asriyani, 2013 : 42).

Akibat dari konflik yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan, kelompok etnis Rohingya mengalami penderitaan yang panjang. Akhirnya mayoritas dari etnis Rohingya memilih untuk meninggalkan Myanmar. Walaupun tanpa tujuan yang jelas, kelompok Rohingya melakukan migrasi ke negara-negara tetangga dan menjadi pengungsi. Pemerintah Myanmar tidak memperdulikan hal ini, karena sebenarnya kepergian etnis Rohingya adalah hal yang diharapkan oleh pemerintah Myanmar. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine masih terjadi hingga pada abad ke-21 ini. Pemerintah Myanmar tentunya

bersama dengan etnis Rakhine yang beragama Buddha dan merupakan etnis mayoritas yang berada di Myanmar. Walaupun etnis Rohingya telah banyak yang meninggalkan Myanmar, namun masih ada beberapa yang memilih menetap di Myanmar. Mayoritas etnis Rohingya pergi ke negara tetangga dekat Myanmar, salah satunya adalah Bangladesh.

2.1.2 Masuknya Etnis Rohingya menjadi Pengungsi di Bangladesh

Ketegangan yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine maupun Rohingya dengan otoritas Myanmar adalah konflik kekerasan yang menjadi sejarah kelam terkait pelanggaran HAM di dunia. Konflik tersebut menyebabkan hilangnya ribuan nyawa, bahkan hancurnya ribuan rumah, sehingga banyak kelompok etnis Rohingya yang memutuskan untuk menjadi pengungsi dan meninggalkan Myanmar (Kipgen, 2013 : 299–308). Pengungsi merupakan orang-orang yang melarikan diri dari perang, kekerasan, konflik atau penganiayaan dan orang-orang yang sudah melintasi perbatasan internasional untuk mencari keselamatan di negara lain, karena terdapat bahaya dan ancaman di negara mereka (UNHCR, n.d.-b). Secara umum alasan mereka meninggalkan negara tersebut adalah karena perlakuan yang tidak adil, atau diskriminasi bahkan perlakuan tidak manusiawi terhadap kelompok mereka oleh pemerintah setempat. Dalam Hukum Internasional, seorang pengungsi diartikan sebagai seseorang yang menetap di luar negara kebangsaannya, mereka menunjukkan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atas dasar tertentu, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari negara asal mereka (United Nations, 1951).

Pada tahun 1977 sejak aksi kekerasan oleh Militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya, terhitung kurang lebih 2,5 juta orang Rohingya pergi meninggalkan Myanmar. Kenyataannya etnis Rohingya telah lama pergi mengungsi ke luar negeri meninggalkan tempat tinggal mereka di Myanmar. Akibat krisis kemanusiaan yang menimpa mereka terjadi sejak lama. Tahun 1978 kembali terjadi perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Bangladesh akibat adanya pelanggaran HAM yang mereka alami. Dalam laporan yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ribuan etnis Rohingya meninggalkan Myanmar. Mereka menjadi pengungsi dengan cara menyeberangi laut menggunakan perahu ke negara-negara tetangga dekat Myanmar untuk mencari perlindungan (UNHCR, 2014). Setelah bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan tindakan kekerasan, mayoritas etnis Rohingya pergi meninggalkan Myanmar walau masih ada yang menetap di bagian Rakhine.

Serangan militer Myanmar terjadi beberapa kali, tahun 1977, 1978, 1991-1992, 2016 dan tahun 2017 menjadi tahun lonjakan pengungsi Rohingya yang terbesar dan tercepat. PBB menyebut tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya pada 25 Agustus 2017 sebagai contoh kejahatan genosida. Akibat dari kejadian tersebut akhirnya membuat kelompok Rohingya pergi meninggalkan Myanmar dengan jumlah yang sangat banyak. *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) adalah jaringan global komunitas Rohingya atau sebuah organisasi yang mendukung dan membela Rohingya. RSO bekerja mencari dan mengumpulkan

data mengenai dimana etnis Rohingya mengungsi dan ada berapa banyak jumlah mereka disana (Alam, 2019a).

Negara–negara tetangga, beberapa diantaranya negara-negara ASEAN yang menjadi tujuan etnis Rohingya diantaranya adalah Thailand, Arab Saudi, Pakistan, India, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Amerika, Australia, Malaysia, Yordania, Indonesia, dan yang paling banyak dituju adalah Bangladesh (Alam, 2019b). Bangladesh menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbanyak oleh etnis Rohingya. Etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar telah menemukan jalan mereka menuju ke Bangladesh untuk menghindari penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah negara mereka sendiri (Ullah, 2011). Jumlah pengungsi Rohingya melonjak, pada Agustus tahun 2017 hampir 700.000 orang yang menyeberang dari Myanmar menuju ke Bangladesh (BBC, 2017).

Seluruh desa dibakar, keluarga dibunuh dan dipisahkan secara paksa, perempuan dan anak perempuan diperkosa secara tidak manusiawi. Sebagian besar orang Rohingya melarikan diri dengan rasa takut karena mengalami trauma berat sebab menyaksikan kericuhan dan kekejaman. Etnis Rohingya melakukan eksodus massal ke Bangladesh, kemudian mereka menemukan tempat berlindung di kamp-kamp pengungsian di tanah sempit distrik Cox’s Bazar. Pengungsi Rohingya bergabung dengan lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri lebih dahulu (Reid, 2021). Kemudian mereka tinggal di tempat pengungsian yang terbuat dari bambu dan terpal yang sangat mudah terbakar yaitu

Cox's Bazar, Bangladesh, saat ini menjadi rumah bagi kamp pengungsi terbesar di dunia (Bhatia et al., 2018).

Gambar 2. 1 Lokasi Distrik Cox's Bazar diantara Myanmar dan Bangladesh



Sumber : *Norwegian Refugee Council* (2019)

Keadaan pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian menjadi perhatian karena sangat rentan terhadap penyakit dan hal-hal yang berbahaya. Rohingya resmi dikenal dengan kelompok pengungsi. Terjadi kenaikan kampanye untuk mengusir Rohingya dari Myanmar pada tahun 2017, perlahan mengubah aliran Rohingya yang melintasi perbatasan menjadi eksodus massal oleh ratusan ribu orang. Terhitung pada bulan Maret tahun 2019, sudah lebih dari 909.000 jumlah pengungsi Rohingya tanpa kewarganegaraan menetap di Ukhiya dan Teknad Upazilas Cox's Bazar Bangladesh. Sebagian besar pengungsi menempati 34 kamp pengungsi dengan sangat padat. Sekitar 626.500 pengungsi Rohingya berada di situs tunggal terbesar Kutupalong-Balukhali (UN OCHA, 2017).

Tabel 2. 1 Jumlah Pengungsi Rohingya tahun 2019

| NO | Negara Tujuan | Jumlah Pengungsi Rohingya |
|-----------|----------------------|---|
| 1. | Bangladesh | 1,6 Juta (sekitar 1,4 juta terdaftar dan 200.000 tidak terdaftar) |
| 2. | Arab Saudi | 470.000 (sekitar 270.000 terdaftar dan 200.000 tidak terdaftar) |
| 3. | Pakistan | 450.000 |
| 4. | Malaysia | 200.000 (sekitar 100.000 terdaftar dan 100.000 tidak terdaftar) |
| 5. | India | 50.000 |
| 6. | UEA | 50.000 |
| 7. | Thailand | 5.000 |
| 8. | Australia | 5.000 |
| 9. | Amerika | 5.000 |
| 10. | Uni Eropa | 3.000 |
| 11. | Yordania | 1.300 |
| 12. | Indonesia | 1.200 |

Sumber : diolah kembali dari RSO (*Rohingya Solidarity Organization*) (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa etnis Rohingya menyebar ke beberapa negara tetangga Myanmar untuk mengungsi dan mencari perlindungan. Keadaan pengungsi Rohingya menjadi perhatian internasional terlebih dari segi keamanan mereka dengan status sebagai pengungsi. Untuk sampai di negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya tidaklah mudah. Perjuangan mereka menempuh perjalanan jauh dan harus menunggu selama berminggu-minggu untuk dapat berlayar ke tempat yang aman. Bahkan para pengungsi Rohingya terdampar di pantai Myanmar sehingga kondisi mereka makin memburuk dan harus menunggu kapal yang akan membawa mereka melewati sungai Naf. Tidak sedikit orang-orang Rohingya yang meninggal dalam kondisi buruk saat terdampar di pantai Myanmar. Para pengungsi Rohingya harus mampu bertahan hidup diatas kapal dalam keadaan sesak dan cuaca yang tidak menentu sehingga banyak orang-

orang Rohingya yang meninggal diatas kapal saat menyebrang ke Bangladesh (UNHCR, 2017).

2.2 Sikap Pemerintah Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya

Bangladesh telah menjadi negara pilihan yang dituju oleh mayoritas pencari suaka Rohingya. Meskipun Bangladesh bukan negara penandatangan Konvensi terkait status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang di dalamnya berisi perjanjian multilateral terkait definisi status pengungsi dan ketetapan hak-hak individual pengungsi serta tanggung jawab negara yang ditempati oleh pengungsi. Namun Bangladesh tetap mengizinkan etnis Rohingya untuk menetap dan mencari perlindungan di perbatasan negaranya dengan Myanmar atas dasar moral (Bhatia et al., 2018). Pemerintah Bangladesh menerima pengungsi Rohingya dengan simpati yang tinggi. Pemerintah juga memberikan dukungan serta bantuan, makanan, tempat tinggal sementara, perawatan medis dan kesehatan serta urusan sanitasi pada awal gelombang pertama datangnya pengungsi pada tahun 1977 (Prodip, 2017).

Di Bangladesh mayoritas pengungsi Rohingya ditampung di Cox's Bazar, yang merupakan salah satu distrik Bangladesh paling dekat dengan perbatasan Myanmar. Pada tahun 1977 saat terjadi gelombang pertama pengungsi Rohingya ke Bangladesh, Komisaris Tinggi PBB khusus untuk pengungsi yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah mengelola dua kamp pengungsi yang akan ditempati oleh para pengungsi Rohingya di Nayapara dan Kutupalong. Dalam menampung dan memberikan layanan kepada pengungsi Rohingya, Bangladesh dibantu oleh beberapa Organisasi Internasional serta

Lembaga Swadaya Masyarakat nasional maupun internasional serta para pendonor. Salah satunya adalah UNHCR yang menjadi mitra utama pemerintah Bangladesh yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan pengungsi Rohingya di kamp pengungsi (UNHCR, 2007).

Awalnya pemerintah Bangladesh menerima kedatangan pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka dan penuh simpati. Pengungsi Rohingya mulai memadati kamp pengungsi di Bangladesh. Seiring masuknya pengungsi, Bangladesh mencoba berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar dengan harapan konflik dapat diakhiri dan pengungsi Rohingya dapat kembali ke Myanmar. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dengan pemerintah Myanmar menghasilkan solusi yaitu kesepakatan repatriasi pertama pada tahun 1992. Pemerintah Bangladesh memulangkan sebagian besar pengungsi Rohingya namun sebagian besar pengungsi tersebut tidak mendapat status resmi sebagai pengungsi oleh pemerintah Bangladesh.

Kebijakan repatriasi yang dilakukan oleh pihak berwenang Bangladesh mengakibatkan keadaan di kamp-kamp pengungsi memburuk karena memaksa pengungsi Rohingya agar kembali ke Myanmar. Setelah tahun 1992 terdapat lebih banyak pengungsi Rohingya namun pemerintah Bangladesh tidak memberikan mereka status resmi sebagai pengungsi. Kemudian pengungsi Rohingya bertahan hidup dalam kondisi yang sulit dan membangun kamp sementara di sekitar kamp-kamp pengungsi yang resmi. Pemerintah Bangladesh tidak mengizinkan para pengungsi yang tidak terdaftar untuk mendapatkan layanan yang disediakan oleh UNHCR dan mitra yang lain (UNHCR, 2017).

Selama beberapa dekade Bangladesh menerima pengungsi yang terus datang ke Bangladesh. Hingga pada tahun 2012 dan 2017 kembali terjadi kericuhan besar di Myanmar yang mengakibatkan adanya aksi pembantaian kepada etnis Rohingya dan berdampak pada kembali terjadinya arus pengungsi dari Myanmar. Sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan Myanmar, dan negara yang sudah pernah menerima pengungsi, maka Bangladesh menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya. Bangladesh menerima pengungsi Rohingya yang masuk ke negara mereka dengan jumlah yang semakin meningkat. Pada sidang umum PBB ke-73 tanggal 28 September 2018, Sheikh Hasina sebagai Perdana Menteri Bangladesh mengumumkan bahwa terdapat 1,1 juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh (Associated Press, 2018).

Sudah beberapa dekade terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta pengusiran secara paksa terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Pada Agustus 2017 kembali terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan kedatangan pengungsi secara massal di Bangladesh. Terdapat lebih dari satu juta pengungsi yang berlindung di Bangladesh, pemerintah Bangladesh menyebut mereka sebagai “*Forcibly Displaced Myanmar Nationals* (FDMNs)” atau “Warga Negara Myanmar yang dipindahkan secara Paksa” daripada disebut sebagai pengungsi (The Daily Star, 2017). Selaras dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Bangladesh bahwa sekitar 1,1 Juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, namun menurut penduduk setempat angka sebenarnya pengungsi jauh lebih tinggi daripada itu (I. Hossain, 2020).

Di wilayah South Cox's Bazar sudah di tempati pengungsi Rohingya lebih dari sepertiga dari masyarakat lokal disana. Dalam sidang PBB ke-73 tahun 2018 Perdana Menteri Bangladesh menyebutkan bahwa selama tiga sampai empat tahun terakhir, Bangladesh sudah melakukan inisiatif secara bilateral untuk mengakhiri masalah Rohingya namun gagal. Kemudian dalam sidang tersebut Perdana Menteri Bangladesh mengatakan bahwa akan mencoba inisiatif multilateral dalam menyelesaikan permasalahan Rohingya (The Daily Star, 2017). Setelah beberapa hal yang disampaikan oleh Perdana Menteri Bangladesh di dalam sidang PBB tersebut, maka kekhawatiran dan respon internasional berkembang mengenai nasib orang-orang Rohingya tersebut.

Sejak awal kedatangan pengungsi Rohingya, fokus pemerintah Bangladesh ialah dapat mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Pemerintah Bangladesh memberikan penekanan terhadap sistem internasional maupun regional mengenai genosida di Myanmar dan menekankan agar Myanmar dapat menciptakan kondisi yang aman dan kebijakan yang tepat. Namun Myanmar tidak membuat langkah maupun kebijakan terhadap kondisi ini (Dempster & Sakib, 2021). Pada Agustus 2017 Bangladesh harus kembali menampung lebih banyak pengungsi Rohingya. Setelah sebelumnya kebijakan repatriasi yang terhenti akibat adanya kericuhan di Myanmar dan membuat pengungsi Rohingya kembali ke Bangladesh, akhirnya pemerintah Bangladesh membuat kebijakan. Walaupun pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum formal. Namun, akibat dari prinsip *nonrefoulement* yang terkandung dalam pasal 33(1) Konvensi 1951, dimana semua negara (termasuk Bangladesh) dilarang menolak pengungsi

sementara yang telah tiba di perbatasan mereka dan mengirim kembali ke negara asal mereka sampai ancaman yang mereka hadapi telah berhenti (Kaur, 2016).

Pemerintah Bangladesh berfokus terhadap kebijakan redistribusi pengungsi serta melakukan pengawasan yang lebih ketat di area kamp-kamp pengungsi. Kebijakan tersebut sangat berpotensi efektif meski dalam jangka waktu yang sebentar. Walau kenyataannya kebijakan ini dapat memperburuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengungsi serta hubungan Bangladesh dengan para pendonor yang membantu terhadap pelayanan pengungsi. Ketika para pengungsi Rohingya sudah tinggal di Bangladesh, namun tidak serta merta membuat kehidupan mereka menjadi tenang sepenuhnya. Terdapat masalah-masalah yang harus mereka hadapi. Pemerintah Bangladesh juga tidak semudah itu dalam memberikan pelayanan kepada pengungsi Rohingya. Bangladesh tidak memiliki kerangka hukum dan administrasi pengungsi maupun suaka nasional, sehingga pengungsi dan pencari suaka berada pada situasi yang genting di Bangladesh. Mereka menghadapi resiko dengan peluang terbatas untuk solusi jangka panjang atas penderitaan mereka (UNHCR, 2007).

Adanya fasilitas pelayanan dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah Bangladesh dan beberapa lembaga bantuan internasional tidak sepenuhnya layak untuk para pengungsi. Organisasi internasional seperti UNHCR dan UNICEF membuat program sebagai bantuan terhadap para pengungsi salah satunya program WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*). Program WASH tersebut berfokus membantu untuk pemenuhan air, sanitasi serta kebersihan. Namun semakin bertambahnya pengungsi yang ada tentunya program ini menjadi tidak

efektif dan mengalami krisis sumber daya terutama air (Acaps, 2017). Kemudian keadaan di kamp pengungsi juga mengkhawatirkan, para pengungsi sulit mencari makanan sehingga mengakibatkan mereka jadi terserang penyakit. Anak-anak pengungsi Rohingya terserang malnutrisi yang umum terjadi. Mengapa anak-anak pengungsi rentan terhadap berbagai hal berbahaya di kamp pengungsi, karena mayoritas pengungsi Rohingya adalah anak-anak.

Di Cox's Bazar terdapat kondisi kriminalitas tinggi khususnya beresiko terhadap anak-anak. Anak-anak mengalami kekerasan dan pelecehan, dieksploitasi, bahkan dijadikan incaran dari perdagangan manusia (Inter Sector Coordination Group, 2017). Anak-anak Rohingya di kamp pengungsi menderita malnutrisi akut atau kurus dengan prevalensi yang sangat tinggi. Selain membutuhkan asupan nutrisi yang sehat, anak-anak pengungsi Rohingya perlu untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang produktif.

Gambar 2. 2 Anak-anak pengungsi Rohingya di Cox's Bazar Bangladesh

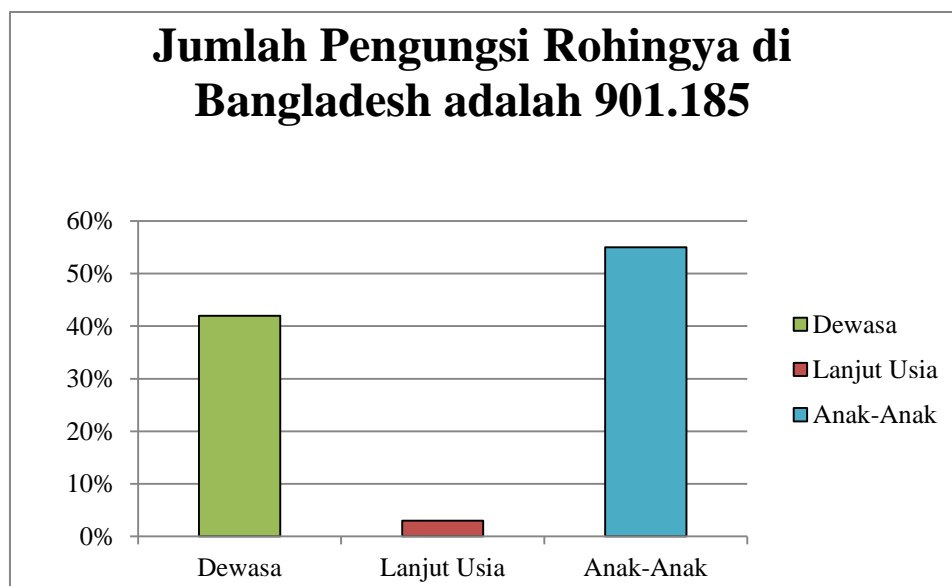


Sumber : Asia Pacific (2018)

2.3 Pendidikan yang diperoleh Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Sebagian besar pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh adalah wanita, orang lanjut usia dan anak-anak. Lebih dari 40% atau sekitar 400.000 anak-anak masih berusia di bawah 12 tahun. Mereka pergi dari Myanmar dan harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai di negara tujuan. Dalam perjalanan mereka menuju ke negara tetangga, dalam harapnya anak-anak Rohingya ini memiliki masa depan yang baik dan terjamin.

Grafik 2. 1 Populasi Pengungsi Rohingya



Sumber : diolah kembali dari UNHRC (2018)

Terdapat banyak perempuan dewasa serta anak pengungsi Rohingya yang telah menyeberang dalam perjalanan laut menggunakan perahu maupun kapal ke Bangladesh. Mereka melarikan diri dari kekerasan massal serta peningkatan risiko kekerasan seksual yang menargetkan komunitas Muslim khususnya wanita dan

anak-anak di negara bagian Rakhine. Para pengungsi etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dengan keadaan tidak memiliki apa-apa, dan rasa trauma yang tinggi, mereka membutuhkan bantuan dan juga perlindungan untuk sekedar merasa aman (UNHCR, 2019).

Anak-anak pengungsi Rohingya tiba di Bangladesh sendirian, mereka mengalami trauma yang berat akibat konflik dan melihat para orangtua, keluarga dan teman-teman mereka dibunuh. Mereka juga menjadi sasaran kekerasan seksual bahkan dibunuh tanpa rasa kemanusiaan. Anak-anak pengungsi Rohingya berjuang dengan masalah kesehatan mental yang parah (Ty, 2019b). Di Bangladesh para pengungsi dan anak-anak tinggal di kamp pengungsian yang kumuh. Akibat keadaan di kamp pengungsian yang semakin rentan, anak-anak pengungsi ini terserang malnutrisi pada tingkat yang berbahaya. Berbagai wabah penyakit di kamp pengungsi dapat menyerang anak-anak pengungsi terutama, difteri, wabah campak serta diare dan infeksi pada anak berusia dibawah 5 tahun. Di kamp pengungsi rentan terjadinya kekerasan seksual terutama pada anak-anak perempuan. Kekerasan terjadi akibat para pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum di Bangladesh (Reid, 2021).

Para pengungsi menderita karena adanya perlakuan sewenang-wenang, mereka diabaikan, terjadinya eksploitasi, tindak kekerasan seksual bahkan anak-anak dijadikan pekerja paksa serta terjadi pernikahan anak. Berstatus sebagai pengungsi, anak-anak Rohingya tidak diizinkan untuk mendaftar pada fasilitas pendidikan lokal. Terdapat sekitar 98% anak-anak dan remaja pengungsi Rohingya yang berusia 15 sampai 24 tahun tidak dapat akses untuk memperoleh

pendidikan. Saat di Myanmar akses pendidikan untuk etnis Rohingya ditolak di Myanmar dan sekitar 270.000 pengungsi anak-anak di bawah usia 12 tahun kehilangan pendidikan (Oxfam International, 2021). Jika anak-anak pengungsi ini tidak mendapatkan pendidikan maka berakibat pada masa depan mereka yang terancam suram.

Pemerintah Burma Myanmar melarang setiap anak yang tidak memiliki bukti kewarganegaraan untuk menerima pendidikan apapun di luar pendidikan yang paling dasar. Dengan demikian Rohingya tidak memiliki akses ke sekolah menengah, akibatnya sangat dirugikan ketika mereka mencari pekerjaan, karena non-warga negara dilarang dari posisi apa pun dalam layanan sipil, termasuk pekerjaan seperti mengajar atau pekerja kesehatan. Sebelumnya pemerintah Bangladesh menolak akses pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di kamp pengungsi. Pemerintah Bangladesh menyatakan bahwa bagaimanapun juga para pengungsi akan kehilangan hak istimewa di negara mereka sendiri. Pernyataan ini bertentangan dengan ketentuan yang dibuat dalam CRC, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menjamin akses semua anak ke pendidikan menengah (Feeny, 2001).

Pada tahun 1997 anak-anak pengungsi menerima kesempatan memperoleh pendidikan formal di kamp pengungsi. Namun, pemerintah Bangladesh tetap membatasi mereka untuk masuk pada tingkat dasar, taman kanak-kanak dan sekolah menengah (Feeny, 2001). Kemudian tahun 2007, pemerintah mendirikan pendidikan menengah bagi anak-anak Rohingya di kamp-kamp pengungsi. Pada

saat itu program pendidikan terus dilanjutkan dan dilaksanakan oleh *Research Training and Management International* (RTMI) menggunakan kurikulum nasional Bangladesh. Terdapat 21 Sekolah Dasar di kamp pengungsi (11 sekolah di Nayapara dan 10 sekolah di Kutupalong) kemudian terdapat masing-masing satu sekolah menengah Nayapara dan Kutupalong. Beberapa guru Bengali maupun Rohingya menawarkan pendidikan kepada anak-anak di sekolah kamp pengungsi (Rohingya Refugee, 2009).

Pendidikan gratis diterima oleh siswa pengungsi Rohingya di kamp pengungsi, kemudian mereka juga mendapatkan peralatan pendidikan secara gratis seperti buku, pulpen, dan pensil yang diberikan oleh pemerintah Bangladesh dan juga organisasi internasional. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan sekolah di kamp pengungsi. Dalam beberapa kasus, guru yang mengajar pada sekolah tidak selalu memenuhi tanggung jawab mereka seperti tidak hadir saat kegiatan mengajar. Akibat dari kelalaian guru ini membuat kualitas pendidikan yang diperoleh menjadi terhambat. Kemudian isu gender juga mempengaruhi pendidikan anak-anak pengungsi, yang mana anak perempuan memiliki batasan untuk ke sekolah. Ternyata para guru yang tidak datang mengajar di sekolah kamp mengatakan bahwa, mereka diberi intensif yang sangat rendah dari pekerjaan mereka sehingga mereka kehilangan minat mengajar dengan upaya yang maksimal (Prodip, 2017).

Sekolah yang dibangun di kamp pengungsi berjalan bertahun-tahun namun tidak memiliki dampak yang kelihatan. Banyak kendala yang terjadi ketika kegiatan sekolah di kamp pengungsian dilaksanakan. Akses pendidikan untuk

anak-anak pengungsi Rohingya dibatasi oleh pemerintah Bangladesh seiring bergantinya tahun. Banyak tantangan yang muncul salah satunya tidak adanya kebijakan pendidikan bagi anak pengungsi (Mst, Habiba, & Karim, 2020). Anak-anak pengungsi tanpa akses ke pendidikan tentu lebih rentan terhadap perdagangan manusia dan kegiatan ilegal lainnya yang tidak hanya berdampak pada Bangladesh namun rentan terhadap kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya hak pendidikan merupakan hak bagi semua orang. Hak pendidikan adalah sebuah norma yang wajib untuk diperjuangkan.

Pemerintah Bangladesh memang membatasi akses pendidikan terhadap anak pengungsi Rohingya. Kemudian dari tahun 2007 hingga tahun 2015 belum ada ketentuan pendidikan yang disetujui untuk anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kemudian pada tahun 2015 pula, pemerintah Bangladesh menyepakati bahwa pendidikan dasar nonformal dapat diberikan kepada anak-anak Rohingya di pemukiman sementara mereka. Namun, sejak Agustus 2017, akses ke pendidikan berkualitas dalam keadaan darurat untuk anak-anak Rohingya menjadi sedikit menantang serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Terlebih saat terjadinya arus pengungsi baru yang masuk secara besar-besaran membuat keadaan semakin rentan (Shohel, 2020). Ketika ratusan ribu pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh pada tahun 2017, anak-anaklah yang menjadi pusat perhatian.

Sebelum masuknya arus pengungsi baru pada Agustus 2017, pelajaran dari pusat pembelajaran sementara di kamp pengungsi terdaftar dilakukan di Bangladesh, dan kerangka kurikulum pendidikan nonformal yang disetujui oleh

pemerintah Bangladesh, yang mencakup Kelas 1 hingga 7 dan digabungkan dengan pendidikan Myanmar, digunakan. Namun, pendidikan anak-anak pengungsi tidak divalidasi oleh Bangladesh atau Myanmar, dan pendidikan yang diberikan di kamp tidak diakreditasi oleh siapa pun. Sehingga muncul kebijakan Pemerintah Bangladesh yang secara tegas melarang penggunaan bahasa serta kurikulum nasional Bangladesh di pusat-pusat pembelajaran untuk anak-anak pengungsi Rohingya (Shohel, 2020).

Saat arus pengungsi baru Rohingya masuk ke Bangladesh, hampir 60 persen di antaranya adalah anak-anak, mereka mengalir melintasi perbatasan dari Myanmar ke Bangladesh. Krisis pendidikan yang terjadi pada anak-anak pengungsi Rohingya menjadi sorotan internasional. Sehingga banyak aktor-aktor domestik Bangladesh maupun aktor-aktor Internasional yang ingin membantu terhadap situasi krisis ini. Keterlibatan beberapa aktor dalam mewujudkan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya tentu memiliki peran penting ketika pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakannya terkait pendidikan anak-anak pengungsi. UNICEF sebagai organisasi internasional sekaligus aktor yang berperan menyebarkan norma hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh hal ini sebagai bentuk dari aksi kemanusiaan yang berlandaskan moralitas dan rasa kemanusiaan.